

Otonomi Dalam Kepemimpinan Sekolah: Peluang, Tantangan, Dan Dampaknya Bagi Sekolah

Nur Alya Fadilla Ismail¹, Nurul Annisa R², Sri Hastuti³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

nurulannizaa@gmail.com, nuralyafadillaismail2329@gmail.com, sri.hastuti@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 02 December 2025

Revised : 09 December 2025

Accepted : 15 December 2025

Available online: 07 January 2026

E-ISSN: 3063-1289

ABSTRACT

Educational autonomy grants schools greater authority to independently manage resources, policies, and operations as a result of post-reform education decentralization. This study aims to analyze the forms of autonomy within school leadership, the opportunities and challenges that arise, and their impact on educational quality. The method employed is a systematic literature review by examining studies from the last five years related to educational autonomy, school leadership autonomy, and education decentralization. The findings indicate that autonomy enables schools to be more adaptive to local needs through flexible curriculum management, human resource management, and financial administration. The success of autonomy implementation is strongly influenced by the principal's leadership competence, particularly transformational leadership that fosters innovation, participation, and collaboration among school members. However, obstacles such as resource disparities, limited managerial capacity, regional budget constraints, and low community involvement remain major challenges. Overall, educational autonomy has the potential to improve school quality when supported by strong leadership, clear regulations, and adequate resource readiness.

Keyword: *educational autonomy, school leadership, decentralization, school-based management, educational quality.*

1. Pendahuluan

Otonomi pendidikan adalah konsep manajerial di mana satuan pendidikan (Sekolah) diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya, kebijakan, dan operasional internalnya. Pelaksanaan otonomi Pendidikan tepatnya berawal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional terdiri atas 22 Bab dan 77 Pasal sebagai wujud Amanah dari salah satu tuntutan reformasi saat itu. perubahan sistem pemerintahan (sentralisasi) ke desentralisasi (otonomi daerah) merupakan salah satu alasan yang melatar belakangi disempurnakannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 (Armansyah, 2022). Perubahan sistem Pendidikan Indonesia terjadi pada saat era reformasi, semua tatanan kehidupan politik dilakukan perubahan mendasar tanpa terkecuali. Demikian juga dengan kebijakan Pendidikan nasional mengalami dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Hartono, 2020).

Berbicara tentang otonomi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah atau dengan kata lain otonomi merupakan proses pelimpahan Sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut membawahi sebelas bidang yaitu; pertahanan, pertanian, Pendidikan dan kebudayaan, ketenagakerjaan, Kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industry, penanaman modal, serta koperasi. Dari sebelas kewenangan tersebut dapat dilihat adanya kewenangan daerah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan. Artinya, aspek Pendidikan dan kebudayaan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi daerah diberi hak untuk mengatur sendiri Pendidikan atau dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam merumuskan, melaksanakan serta melakukan supervise dan mengevaluasi Pendidikan yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah (Hartono, 2020).

Menurut (Indrawan, 2024) mengatakan bahwa pengelolaan Pendidikan yang terpusat atau sentralisasi tidak mendorong demokrasi dan mengakibatkan kebijakan yang seragam yang tidak mampu mengkoordinir perbedaan keberagaman, kepentingan daerah, kepentingan sekolah, peran masyarakat dalam proses

Pendidikan padam, dan alokasi anggaran Pendidikan yang terbuang percuma. Akibat sentralisasi, sekolah tidak mempunyai kebebasan dalam mengembangkan diri, sekolah yang baik akan terhambat karena terpaksa mengikuti peraturan pemerintah pusat. Kemudian Dalam konteks desentralisasi, otonomi ini memungkinkan sekolah untuk menjadi lebih mandiri, responsive terhadap kebutuhan lokal, dan inovatif dalam mengikuti perkembangan zaman. hal ini sejalan dengan pendapat (Harahap, 2020) yang mengatakan bahwa otonomi dalam Pendidikan memberi ruang yang luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya berdasarkan potensi daerahnya. Hal ini menggambarkan bahwa desentralisasi dalam Pendidikan merupakan Langkah dalam menemukan pandangan baru terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Otonomi dalam Pendidikan memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, karena menyadari bahwa antara satu daerah dengan daerah lain memiliki kemampuan sumber daya yang berbeda (Nursofah et al., 2023). Artinya, adanya otonomi ini dapat mengoptimalkan potensi lokal dan merancang strategi Pendidikan yang lebih kontekstual dan relevan. Dapat dikatakan juga bahwa otonomi Pendidikan merujuk pada kewenangan sekolah dalam pengelolaan dan pembuat Keputusan secara mandiri, oleh karenanya dapat menjadikan sekolah lebih responsive terhadap karakteristik lokal dan kebutuhan peserta didik.

Dalam konsep ini, kepala sekolah dan pengelola Pendidikan di level lokal memegang peran kunci dalam menerapkan otonomi secara efektif. dengan adanya otoritas manajerial yang lebih besar, pemimpin sekolah harus mampu mengelola sumber daya secara strategis dan mendorong inovasi pembelajaran. Era otonomi menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin strategis yang memegang peranan penting dalam menentukan arah perkembangan sekolah. Dengan adanya kewenangan inilah kepala sekolah tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan. Jika dilihat dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , kepala sekolah harus mampu mengambil Keputusan manajerial secara mandiri dan mendorong partisipasi para pemangku Pendidikan. (Az-Zahra & Sari, 2025) dalam tulisannya menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan cakap sangat penting bagi kemampuan MBS untuk meningkatkan standar Pendidikan, karena pemimpin yang efektif mengarahkan pengambilan Keputusan, melibatkan guru dalam perencanaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung.

Selain aspek manajerial, kepala sekolah juga dituntut untuk menjadi pemimpin transformasional yang visioner dan inovatif. (Restu Rahayu & Sofyan Iskandar, 2023) dalam tulisannya menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah sangat signifikan, karena pemimpin harus mampu menginspirasi, mendorong inovasi, dan membangun kolaborasi antar guru serta siswa. tidak hanya itu, kepemimpinan kepala sekolah juga akan berdampak pada ekosistem sekolah yang lebih berkelanjutan. Menurut (Nawireja et al., 2025) kepala sekolah dapat mewujudkan sekolah sebagai komunitas belajar yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan kepemimpinan yang melibatkan semua warga sekolah dan mendukung pembaruan Pendidikan secara terus menerus.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa otonomi dalam Pendidikan mendorong banyak perubahan. Penelitian oleh (Diantoro, 2022) yang berjudul “Education Autonomy in the disruption era: construction of school based management implementation in madrasah” menjelaskan bagaimana otonomi dikonstruksi, peran kepala madrasah dalam memanfaatkan wewenang, dan dampaknya terhadap visi misi sekolah dan peningkatan Pendidikan. kemudian penelitian oleh (Durotun Nasihah et al., 2023) yang berjudul “pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan” menjelaskan tentang bagaimana otonomi daerah diterapkan dalam Pendidikan, hambatan dalam sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat, serta pentingnya akuntabilitas dalam manajemen lokal. Selanjutnya dalam penelitian yang berjudul “otonomi Pendidikan sebagai upaya meningkatkan sumberdaya sekolah” menganalisis bagaimana otonomi Pendidikan meningkatkan sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia (guru) maupun sumber daya fisik melalui partisipasi sekolah dalam pengambilan Keputusan dan pengelolaan lokal. Temuan – temuan tersebut menggambarkan otonomi dalam Pendidikan dan kepemimpinan sekolah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk – bentuk otonomi dalam kepemimpinan sekolah, peluang otonomi bagi kepemimpinan sekolah, tantangan otonomi bagi kepemimpinan sekolah, dampak otonomi terhadap mutu sekolah, implikasi bagi masa depan kepemimpinan sekolah.

Sejalan dengan kajian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan otonomi pendidikan dalam kepemimpinan sekolah serta bagaimana kewenangan tersebut memengaruhi pengelolaan, pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dalam penerapan otonomi sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan sekolah dalam mengelola kewenangan secara mandiri sesuai dengan karakteristik lokal.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai bentuk-bentuk otonomi yang dijalankan oleh kepala sekolah, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dan kemandirian sekolah,

serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan otonomi terkait sumber daya manusia, budaya organisasi, dan sistem pendukung sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dampak otonomi terhadap mutu sekolah, baik dari segi kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, maupun efektivitas manajemen sekolah. Di sisi lain, penelitian ini mempertimbangkan implikasi otonomi bagi masa depan kepemimpinan sekolah, termasuk kebutuhan penguatan kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin strategis dan agen perubahan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa otonomi Pendidikan memberikan sekolah kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya, kebijakan, dan operasionalnya, sehingga memungkinkan sekolah lebih mandiri, responsive terhadap kebutuhan lokal, dan inovatif. Keberhasilan implementasi otonomi sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah yang kompeten, strategis, dan transformasional, karena kepala sekolah sangat berperan penting dalam pengambilan Keputusan. Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa otonomi Pendidikan dapat meningkatkan mutu sekolah, profesionalisme guru, dan optimalisasi sumber daya, meskipun tetap menghadapi tantangan terkait kesiapan sumber daya dan akuntabilitas.

2. Metode dan Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review dengan pendekatan Kualitatif. Dalam metode systematic literature review para peneliti mencari referensi jurnal ilmiah maupun bahan penelitian lain yang dapat dijadikan acuan maupun landasan teori bagi penelitian yang baru yang mana Ketika sudah mendapatkan bahan atau pedoman dari adanya referensi oleh peneliti lain, peneliti akan dapat menemukan suatu rumusan masalah untuk selanjutnya dikembangkan menjadi pembahasan serta melewati tahap – tahap atau Langkah – Langkah yang pastinya sudah ditentukan (perry & Hammond 2002) dalam (Andriani, 2022). Dalam hal ini peneliti menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian relevan menggunakan kata kunci “otonomi Pendidikan”, “otonomi kepemimpinan sekolah”, dan “desentralisasi Pendidikan”. setiap sumber yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi topik penelitian dengan tahun publikasi lima tahun terakhir. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola – pola konseptual dan temuan utama pada berbagai penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai otonomi dalam kepemimpinan sekolah : Peluang, tantangan, dan dampaknya bagi sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Fereday & Muir-Cochrane 2006 dalam (Heriyanto, 2020) yang mengatakan bahwa analisis tematik adalah salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Otonomi dalam kepemimpinan sekolah merupakan perluasan wewenang yang memungkinkan kepala sekolah untuk mengelola berbagai aspek pendidikan secara lebih mandiri dan sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah. Otonomi ini tidak hanya berkaitan dengan kemandirian administratif, tetapi juga membuka ruang bagi kepala sekolah untuk berinovasi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan menyesuaikan kebijakan internal dengan karakteristik siswa dan lingkungan sosial. Namun, efektivitas implementasi otonomi sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, termasuk kemampuannya dalam merancang strategi pembelajaran, mengelola sumber daya, membangun kolaborasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, sebelum membahas bentuk dan implementasinya, penting untuk memahami bahwa otonomi sekolah pada dasarnya memberikan peluang strategis yang dapat berdampak signifikan pada kualitas pendidikan jika didukung oleh kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan profesional.

Bentuk dan Implementasi Otonomi dalam Kepemimpinan Sekolah

Otonomi dalam kepemimpinan sekolah memiliki cakupan yang cukup luas dan memberikan ruang strategis bagi kepala sekolah untuk menyesuaikan arah Pendidikan dengan kebutuhan lokal, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kompetensi kepemimpinan dari kepala sekolah. Berikut beberapa temuan mengenai bentuk dan implementasi otonomi dalam kepemimpinan sekolah:

1) Otonomi dalam pengelolaan kurikulum

Kepala sekolah merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam pengelolaan kurikulum di sekolah. Dalam kerangka otonomi, kepala sekolah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, kepala sekolah juga memegang peran dalam pengambilan Keputusan mengenai perancangan inovasi pembelajaran yang relevan dan dapat menyesuaikan dengan konteks sekolah. Menurut (Sripurwati et al., 2025) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Ketika kepala sekolah terlibat aktif dalam supervise dan perencanaan kurikulum, fleksibilitas kurikulum bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik siswa dan konteks lokal.

Selain itu, pada era perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, manajemen kepala sekolah sangat diuji. Hal ini sejalan dengan pendapat (Putra et al., 2025) yang mengatakan bahwa kepala sekolah harus mampu mengelola perkembangan di era industry 4.0 untuk meningkatkan efektivitas kurikulum Merdeka, tetapi kendala fasilitas dan infrastruktur masih menjadi hambatan. Hal ini menggambarkan bahwa otonomi kurikulum juga menuntut adanya dukungan agar kebebasan dalam penyusunan kurikulum tidak terhambat oleh aspek fisik maupun teknis. Selain itu kepala sekolah juga berperan sebagai fasilitator bagi pengembangan guru melalui pelatihan dan pendampingan agar inovasi kurikulum dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, dari perspektif kepemimpinan transformasional, (Prastyowati et al., 2024) menyebutkan bahwa kepala sekolah yang menerapkan gaya transformasional dapat membentuk visi Bersama, memotivasi guru, dan menggerakkan perubahan budaya untuk mendukung implementasi kurikulum. Ini memperjelas bahwa tidak cukup hanya memberi otonomi, kepala sekolah juga harus aktif dalam memberikan inspirasi dan arahan kepada seluruh warga sekolah agar perubahan kurikulum dapat berjalan efektif. dengan kata lain kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pengelola administratif tetapi juga sebagai agen yang mampu membawa perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa otonomi kurikulum dapat menjadi efektif apabila kepala sekolah mampu mengintegrasikan kebebasan structural dengan kepemimpinan visioner, sehingga inovasi yang dibawa dapat berlangsung secara konsisten dan berdampak positif terhadap kualitas Pendidikan.

2) Otonomi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Otonomi kepala sekolah dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) memungkinkan kepala sekolah untuk mengatur, mengembangkan, dan memotivasi guru serta tenaga kependidikan. kepala sekolah memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian tugas, merancang program pengembangan profesional, melakukan supervisi internal, dan mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kepala sekolah harus mengoptimalkan penugasan guru, supervisi, dan pengembangan profesional mereka. hal ini sejalan pendapat (Suryati et al., 2022) yang menegaskan bahwa kepala sekolah sangat berperan dalam meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi era revolusi 4.0 melalui pelatihan dan manajemen yang efektif. dengan demikian, otonomi memberikan ruang kepada kepala sekolah untuk merancang strategi peningkatan kualitas guru yang lebih adaptif dengan kebutuhan zaman.

Kemudian berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah, penelitian oleh (Anilia et al., 2024) menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran penting dalam “perencanaan, pengadaan sarana-prasarana dan evaluasi program, serta melibatkan guru dan tenaga kependidikan dalam tim manajemen sekolah. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa otonomi dalam manajemen sumber daya manusia tidak hanya soal bagaimana mengelola guru, tetapi juga bagaimana kepala sekolah memfasilitasi keterlibatan guru dalam manajemen sekolah agar Keputusan manajerial bisa lebih transparan.

3) Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Sarana-Prasarana

Otonomi kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana merupakan salah satu wujud desentralisasi kewenangan di tingkat sekolah, yang memberi kepala sekolah kebebasan untuk merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), menentukan prioritas pengeluaran, serta memastikan dana, termasuk Dana BOS, digunakan secara efisien dan transparan. Selain itu, otonomi ini juga mencakup pengelolaan sarana-prasarana, seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung pembelajaran, sehingga kualitas lingkungan belajar dapat terjaga. (Lullung et al., 2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepala sekolah sebagai inovator melakukan sosialisasi pengelolaan dana kepada komite sekolah dan transparansi anggaran dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan. artinya, otonomi keuangan harus diimbangi dengan mekanisme keterlibatan seluruh warga sekolah dan stakeholder agar tercipta akuntabilitas.

Oleh karena itu, Pelaksanaan otonomi yang efektif membutuhkan keterampilan manajerial, akuntabilitas tinggi, dan keterlibatan komite sekolah atau pemangku kepentingan lainnya agar penggunaan dana dan fasilitas dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan serta mendorong terciptanya sekolah yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.

4) Otonomi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan Keputusan memungkinkan kepala sekolah menetapkan kebijakan internal yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Otonomi kepala sekolah dalam pengambilan Keputusan mencerminkan peran strategis kepala sekolah sebagai pemimpin yang tidak hanya menjalankan kebijakan dari atas, tetapi juga aktif menentukan arah kebijakan internal sekolah sesuai konteks lokal. Dalam tulisan (Az-Zahra & Sari, 2025) menegaskan bahwa partisipasi aktif kepala sekolah dalam pengambilan Keputusan menjadi salah satu

faktor utama keberhasilan manajemen berbasis sekolah, karena memungkinkan keterlibatan guru dalam perencanaan dan kebijakan sekolah sehingga keputusan lebih relevan dengan kebutuhan sekolah.

Selain itu, gaya pengambilan Keputusan kepala sekolah sangat memengaruhi efektivitas sekolah. Kepala sekolah menggunakan berbagai gaya pengambilan Keputusan, seperti otoritatif, konsultatif, dan *delegated* tergantung masalah dan konteks, sehingga gaya Keputusan kepala sekolah disesuaikan dengan situasi agar dampak keputusannya terhadap efektivitas sekolah dapat optimal (Tomatala et al., 2023).

Secara operasional, kepala sekolah mengikuti Langkah – Langkah sistematis dalam membuat Keputusan seperti identifikasi masalah, analisis alternatif, evaluasi, hingga, pemberian Solusi. Menurut (Reni Arneti et al., 2024) kepala sekolah dapat membedakan pelanggaran disiplin ringan hingga berat, lalu menentukan sanksi yang tepat berdasarkan klasifikasi tersebut. Otonomi pengambilan Keputusan juga berkontribusi pada penguatan manajemen berbasis data di sekolah yang mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi Keputusan, memperkuat penilaian berbasis bukti, dan mendorong budaya kolaboratif dan akuntabel (Susanto et al., 2025).

Peluang Otonomi Bagi kepemimpinan Sekolah

Peluang otonomi kepala sekolah dalam Upaya untuk memperkuat penerapan otonomi sekolah di lingkungan Pendidikan, memerlukan strategi yang menyeluruh dan terarah. Menurut Maulana et al. (2023), terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Penguatan kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
Diperlukan program pelatihan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola otonomi sekolah. Pelatihan ini hendaknya mencakup pengembangan visi, manajemen konflik, pembentukan tim kerja yang solid, serta kemampuan komunikasi yang efektif.
2. Pembentukan komite sekolah yang partisipatif dan inklusif.
Komite sekolah sebaiknya terdiri atas perwakilan kepala sekolah, guru, staf, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kehadiran berbagai unsur ini memungkinkan terciptanya ruang kolaboratif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan maupun program sekolah, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih representatif dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan.
3. Peningkatan kolaborasi antar sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.
Kerjasama dengan berbagai lembaga, baik formal maupun non-formal, termasuk organisasi masyarakat dan instansi pemerintah, dapat memperluas akses terhadap sumber daya, pengalaman, serta memperkuat sinergi dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.
4. Mendorong partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekolah.
Keterlibatan orang tua dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan kebijakan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui forum diskusi, rapat, atau konsultasi yang rutin dilakukan antara pihak sekolah dan masyarakat.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut secara berkelanjutan dan terpadu, diharapkan otonomi sekolah di lembaga pendidikan Islam dapat berkembang lebih optimal. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, langkah ini juga memperkuat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan bersama untuk memajukan mutu pendidikan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. (Priyadi, 2024)

Tantangan Otonomi Bagi Kepemimpinan Sekolah

Pelaksanaan otonomi sekolah di lingkungan pendidikan Islam menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks dan memerlukan strategi yang tepat untuk diatasi. Berdasarkan hasil analisis studi kasus, Maulana et al. (2023) mengidentifikasi beberapa tantangan utama sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan kemampuan kepemimpinan.
Salah satu kendala utama dalam penerapan otonomi sekolah adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan kepemimpinan di kalangan kepala sekolah serta tenaga pendidik. Minimnya wawasan mengenai konsep otonomi sekolah dan kurangnya kemampuan dalam merancang strategi kepemimpinan yang efektif menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi yang optimal.
2. Adanya resistensi terhadap perubahan.
Upaya penerapan otonomi sekolah sering kali menghadapi penolakan dari berbagai pihak, termasuk guru, staf sekolah, maupun orang tua. Kekhawatiran terhadap ketidakpastian, kehilangan kendali, serta perubahan peran dan tanggung jawab dapat memicu resistensi yang tinggi terhadap transformasi yang dibutuhkan.

3. Keterbatasan sumber daya dan dukungan eksternal.
Tantangan lain yang sering muncul adalah kurangnya ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk fisik, keuangan, maupun sumber daya manusia. Kondisi ini menyulitkan sekolah dalam mengembangkan serta menjalankan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, lemahnya dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat turut memperlambat proses penerapan otonomi secara efektif.
4. Ketidakstabilan politik dan sosial.
Faktor eksternal seperti situasi politik dan sosial yang tidak stabil juga berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi sekolah. Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan program, sementara kondisi sosial yang tidak kondusif berpotensi menurunkan semangat belajar peserta didik dan kinerja tenaga pendidik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak terkait—mulai dari kepala sekolah, guru, staf, orang tua, pemerintah, hingga masyarakat. Upaya penguatan kapasitas kepemimpinan, peningkatan komunikasi dan partisipasi untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta stabilitas lingkungan politik dan sosial menjadi faktor kunci dalam mewujudkan implementasi otonomi sekolah yang efektif dan berkelanjutan. (Priyadi, 2024)

Dampak Otonomi Terhadap Mutu Sekolah

Implementasi otonomi Pendidikan di sekolah sejaun ini membawa sejumlah dampak signifikan terhadap mutu Pendidikan. (Parastu et al., 2023) dalam tulisan mengatakan bahwa dengan adanya otonomi, Pendidikan mampu meningkatkan kualitas sekolah karena masing – masing daerah dan sekolah menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan program sekolah sebagai penunjang peningkatan mutu. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi sekolah memberikan pengaruh untuk merespon kebutuhan lokal, menginisiasi inovasi, dan menyesuaikan strategi Pendidikan agar lebih relevan dengan konteks siswa dan masyarakat lokal.

Dari sisi profesionalisme guru dan budaya kerja sekolah, otonomi yang dilekatkan pada manajemen berbasis sekolah memungkinkan kepala sekolah dan guru untuk mengambil inisiatif dalam pembaruan pembelajaran dan peningkatan kapasitas. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap mutu Pendidikan. hal ini sejalan dengan pendapat (Riyatno et al., 2024) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan tersebut meningkatkan profesionalisme guru dan peran komite sekolah, yang secara kumulatif berkontribusi pada kenaikan mutu Pendidikan. lebih lanjut jika dihubungkan dengan konsep desentralisasi Pendidikan dalam otonomi daerah membuka ruang bagi guru untuk lebih meningkat yang memungkinkan mereka menyesuaikan praktek mengajar sesuai kebutuhan siswa (Wibowo et al., 2025).

Mengenail efektivitas implementasi kurikulum, otonomi sekolah melalui MBS memberi keluasaan bagi sekolah untuk mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik lokal. Menurut (Narendas et al., 2024) otonomi sekolah adalah upaya memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah mulai dari kurikulum hingga metode pengajaran. Adanya kebebasan ini memungkinkan sekolah untuk merancang proses belajar yang lebih kontekstual dan inovatif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan relevansi Pendidikan.

Terkait dengan akreditasi dan mutu layanan Pendidikan. otonomi memberikan potensi positif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Parastu et al., 2023) yang menunjukkan bahwa melalui otonomi, sekolah mampu meningkatkan standar akreditasi dengan memperbaiki sarana-prasarana dan pengawasan terhadap tenaga kependidikan, sehingga mutu layanan Pendidikan naik. Selain itu manajemen mutu yang kuat di era otonomi daerah juga mendorong kepala sekolah dan guru untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas Pendidikan sesuai dengan nilai tata Kelola yang baik (Haryati, 2023).

4. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Otonomi pendidikan memberikan ruang yang lebih luas bagi sekolah untuk mengatur dan mengelola sumber daya, kebijakan, serta pengambilan keputusan secara mandiri sesuai kebutuhan lokal. Melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dan sekolah, proses pengelolaan pendidikan menjadi lebih fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap karakteristik peserta didik dan lingkungan. Dalam praktiknya, otonomi ini juga menempatkan kepala sekolah sebagai figur strategis yang tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi sebagai pemimpin transformasional yang mampu mendorong inovasi, memberdayakan guru, membangun kolaborasi, serta mengarahkan sekolah menuju mutu yang lebih baik.

Namun, pelaksanaan otonomi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sumber daya antar daerah, keterbatasan kompetensi SDM, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya dukungan pemerintah daerah. Meskipun begitu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang kompeten, efektif, dan visioner, otonomi pendidikan dapat meningkatkan kualitas sekolah, profesionalisme guru, dan efektivitas manajemen. Otonomi pada akhirnya menjadi peluang besar bagi sekolah untuk berkembang, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan daerah, tata kelola yang baik, dan kapasitas kepemimpinan yang mampu menyelaraskan kebijakan, potensi lokal, serta kebutuhan pendidikan masa kini.

Saran

Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, sekolah perlu memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala sekolah melalui peningkatan kompetensi manajerial, kemampuan mengambil keputusan berbasis data, dan pengembangan karakter kepemimpinan transformasional. Pemerintah daerah juga perlu lebih proaktif dalam mendukung pendidikan melalui alokasi anggaran yang memadai, pembinaan berkelanjutan, serta memastikan adanya sinergi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, pelibatan masyarakat harus terus ditingkatkan karena kolaborasi publik akan memperkuat akuntabilitas dan memastikan program pendidikan berjalan sesuai kebutuhan lingkungan. Dengan dukungan yang seimbang antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, otonomi pendidikan dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Anilia, S., Akhtar, S., & Amini, A. (2024). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (Studi SMA Negeri 1 Singkil Utara)*. Vol.7. <https://doi.org/10.30743/best.v7i1.9697>
- Armansyah, Y. (2022). *MENYOAL RELEVANSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*.
- Az-Zahra, V. D., & Sari, W. (2025a). *PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH*. 5(1).
- Az-Zahra, V. D., & Sari, W. (2025b). *PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH*. 5(1).
- Diantoro, F. (2022). EDUCATION AUTONOMY IN THE DISRUPTION ERA: CONSTRUCTION OF SCHOOL BASED MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN MADRASAH. *Kodifikasia*, 16(1), 133–149. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.4709>
- Durotun Nasihah, Anis Fauzi, & Abdul Muin. (2023). PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN. *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12(1), 19–27. <https://doi.org/10.33506/jq.v12i1.2238>
- Harahap, E. K. (2020). MANAJEMEN OTONOMI PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 1(02), 137. <https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.104>
- HARTONO. (n.d.).
- Hartono, H. (2020). Otonomi Pendidikan. *Potensia Jurnal Kependidikan Islam, Vol 1 No 1*.
- Haryati, T. (2023). *Manajemen Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah*.
- Heriyanto, H. (2020). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Indrawan, I. (2024). Fungsi Lembaga Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 71–80. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i1.104>
- Lullung, C., Dwiyono, Y., & Nurlaili, N. (2025). Manajemen Kepala Sekolah Sebagai Inovator dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Bontang. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, Vol.6. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v6i2.23169>
- M. Munir Mansyur. (n.d.).
- Narendas, O. M., Suyatno, S., & Widodo, H. (2024a). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Otonomi Sekolah di SMP*. 6(6).
- Narendas, O. M., Suyatno, S., & Widodo, H. (2024b). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Otonomi Sekolah di SMP*. 6(6).
- Nawireja, I., Simanjuntak, C., Hutahaean, M., Leriya, D., Putri, N., Ananda, E., & Putra, R. (2025). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Sebagai Komunitas Belajar Yang*

- Berkelanjutan. *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah, Vol.10*. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i1.385>
- Nursofah, N., Rugaiyah, R., & Madhakomala, M. (2023). Otonomi Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Sumberdaya Sekolah. *Jurnal INDOPEdia (Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan), Vol. 1 Nomor 1*.
- Parastu, R. A., Dinata, D. D., Tyastuti, D., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. (2023). Pengaruh Otonomi Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu di SDN 55/I Sridadi. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(10)*, 8121–8125. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3038>
- Prastyowati, M., Oktarina, N., & Rohkman, F. (2024). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 9*.
- Priyadi, Y. (2024). *PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI SEKOLAH YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN*.
- Putra, D., Iskandar, Y., Efendi, E., Sefrinal, S., & Amarullah, T. (2025). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Perkembangan di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Pendidik Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah, Vol.10*. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.658>
- Ramdani, I., & Anjar, G. (n.d.). *OTONOMI SISTEM DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (PENDEKETAN SCHOOL BASED MANAGEMENT)*.
- Reni Arneti, Nasrul, Nurhizrah Gistituati, & Hadiyanto. (2024). Langkah Kepala Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Niara, 17(1)*, 9–19. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i1.18785>
- Restu Rahayu & Sofyan Iskandar. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran Abad 21 Di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia, 6(2)*, 287–297. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5484>
- Riyatno, Y., Kusumaningsih, W., & Soedjono, S. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, dan Peran Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah, 5(2)*, 485–492. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.237>
- Sripurwati, S., Yuliejantiningih, Y., & Haryati, T. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri Se Kecamatan Japah Kabupaten Blora. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 6(3)*. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3.4422>
- Suryati, L., Maksum, H., & Rahmadhani, S. (2022). Manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi guru menghadapi era revolusi 4.0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 6(3)*, 632–642.
- Susanto, T. T. D., Syafruddin, L., & Abdullah, S. F. (2025). PENINGKATAN KUALITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS DATA DI SEKOLAH. *JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan dan Keguruan, 6(2)*, 235–250. <https://doi.org/10.31949/madinasika.v6i2.13723>
- Tomatala, W., Wenno, I. H., & Laurens, Th. (2023). Gaya Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Sekolah pada SMA Negeri di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 4(2)*, 1307–1314. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.429>
- Wibowo, S., Sirait, R., Oktarina, N., & Joko, J. (2025). *Otonomi Guru: Belajar Dari Negara Dengan Skor Pisa Tinggi Untuk Meningkatkan Pendidikan di Indonesia. 10*. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.26628>